



Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Terima Penghargaan BKKBN

Serapan Anggaran Bantuan Operasional KB Capai 92 Persen

SUKADANA—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penghargaan ini diraih atas capaian daerah yang telah menyerap dana alokasi khusus (DAK) bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) di atas 90 persen. Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kayong Utara pun menjadi satu-satunya kabupaten yang menyerap BOKB tertinggi se-Kalimantan Barat dengan realisasi 92 persen.

Kepala Dinas Kesehatan dan KB, Iwan Dwi Purnomo melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Dedet Triwahyudi mengatakan bahwa faktor utama pendorong pencapaian dalam penyerapan anggaran BOKB, yakni dukungan dari Pimpinan Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan. Selain itu, diakui juga *team work* yang solid dalam bekerja dan didukung oleh OPD terkait, serta peran aktif masyarakat melalui mapping kegiatan prioritas, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus fisik reguler sub bidang keluarga berencana tahun 2022 dan pedoman standar pengelolaan keuangan daerah.

“Basis data yang di verifikasi dan validasi sehingga menjadikan data tersebut menjadi bahan untuk menyusun kebutuhan program melalui perencanaan. Kebutuhan program disesuaikan dengan tantangan di Kabupaten Kayong Utara, sehingga pelaksanaan tepat sasaran,” kata Dedet saat dikonfirmasi di Pontianak, Rabu (22/2)

Dedet menerangkan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dalam pelaksanaan

aannya memerlukan komitmen, dukungan, dan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah. Menurutnya, prasyarat tersebut adalah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (DTPK) dapat merasakannya.

“Visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang

kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing,” tuturnya.

Dia menambahkan, rumusan program atau kegiatan yang dirancang dalam Renstra BKKBN-12-2020-2024 telah memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu strategis yang berkembang sehingga pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

“Melalui skema dana alokasi khusus (DAK) fisik, pemerintah membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program Bangga Kencana yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah mendapat dukungan penganggaran melalui DAK Fisik Subbidang KB bagi kabupaten dan kota,” ungkap Dedet.

Dukungan anggaran terse-



PROKOPIM FOR PONTIANAK POST

TERIMA PENGHARGAAN: Ketua TP PKK Kayong Utara Yayuk Winarti menerima secara simbolis penghargaan dari BKKBN Kalbar di Pontianak, kemarin.

but, menurut dia, diarahkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu melalui Program Bangga Kencana, terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran RPJMN IV tahun 2020 - 2024, yaitu untuk menurunkan angka kelahiran total atau *total ferti-*

lity rate (TFR) menjadi 2,24, meningkatkan pemakaian kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 62,16 persen, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) menjadi 8,30 pada akhir tahun 2022.

“Kebijakan umum yang berlaku adalah bahwa DAK sifatnya untuk membantu

daerah, bukan menggantikan APBD. Untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten dan Kota yang kuat agar DAK dapat menjadi pengungkit bagi daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan,” paparnya.

Dedet menyebut untuk tahun 2022, Pemerintah memberikan dukungan DAK Fisik Sub Bidang KB untuk 4 area yaitu sarana dan prasarana pelayanan KB, sarana transportasi KB, sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di kabupaten dan kota, serta sarana dan prasarana penyuluhan penurunan *stunting*.

Ke depannya, Dedet berharap setelah mendapatkan apresiasi dari BKKBN, kerja tim yang terencana dan efektif, sehingga perencanaan, pelaksanaan tetap solid dan berupaya tetap memaksimalkan penyerapan penggunaan dana alokasi khusus fisik reguler Sub Bidang Keluarga Berencana tahun 2023. (*dan*)